KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bongkar Rekam Jejak KPK: Pansus Angket DPR Tidak Boleh Kendor
Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Bongkar Rekam Jejak KPK

Pansus Angket DPR Tidak Boleh Kendor



SERAHKAN BERKAS: Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (berpeci) menyerahkan berkas hasil kerja Pansus ke Koordinator GIB Adhie Massardi (berbatik putih) dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Romdony Setiawan di Media Center DPR Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Tak boleh layu sebelum berkembang, ungkapan yang tepat untuk mendorong Pansus Angket KPK. Di tengah gunjingan melempemnya kinerja Pansus, sang nahkoda Agun Gunandjar membantah hal tersebut. Sebab, kata dia, jika berhenti di tengah jalan, benang kusut penanganan korupsi yang dilakukan Lembaga Antirasuah tak akan diketahui publik.

"KITA harus mendukung Pansus KPK, dan Pansus akan memberi laporan secara terbuka. Yang benar akan kita katakan benar, sementara yang salah kita katakan salah," tegas Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar saat diskusi dengan Wartawan Parlemen di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Saat ini, ujar dia, pihaknya dituntut untuk mengencangkan ikat pinggang. Karenanya, Pansus akan memanggil pimpinan KPK perihal temuan yang didapat dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan menjadi ajang konfirmasi, sekaligus pengungkapan kebenaran.

Sayangnya, lanjut Agun, iktikad baik Pansus belum mendapat balasan. Tidak ada tanda-tanda dari pimpinan KPK untuk mengurai benang kusut penanganan korupsi. "Kalau ada sinyal saling menghargai dan menghormati, agenda pertemuan dengan KPK tentu akan berjalan," cetus dia.

Poltisi Partai Golkar ini mencontohkan, pihaknya telah mengirim surat untuk menghadirkan tersangka korupsi KTP elektronik, Miryam S Haryani. Namun, tagline berani jujur dan bersih, tak tercermin dari lembaga yang dipimpin Agus Raharjo itu. KPK tak merespons iktikad Pansus untuk mengurai penanganan korupsi.

"Sebagai pihak yang ikut terlibat dalam perumusan Undang-Undang KPK, saya sangat kecewa. Ini tak seperti yang saya impikan," keluhnya.

Agun menilai, temuan penelusuran Pansus atas rekam jejak KPK selama 15 tahun perlu dibeberkan. Menurut dia, publik perlu mengetahui, apakah KPK menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, maupun penyelidikan. Pansus juga akan melihat proses penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK, apakah sudah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pansus menemukan fakta, ada seorang saksi yang tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan. Kemudian, ada terdakwa yang mencabut BAP di pengadilan, lantaran merasa tidak dapat melakukan pembelaan saat penyidikan sedang berjalan," ungkap Anggota Komisi I DPR ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu mengatakan, hasil temuan Pansus Angket KPK membuka kotak pandora penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pansus menemukan adanya pelanggaran HAM oleh KPK, seperti penyekapan dan pengarahan terhadap seseorang untuk memenuhi hasrat KPK.

"Kami baru tahu, ada saksi yang diarahkan oleh penyidik KPK. Selain itu, kami juga menemukan adanya aset hasil korupsi yang disita oleh KPK, katanya disetor ke negara, tapi tidak disetorkan," ungkap Masinton.

Untuk menutupi berbagai kebobrokan itu, lanjut dia, KPK menggiring opini bahwa objek kerja Pansus mengada-ada, dan tidak sesuai aturan. Padahal, Pansus memiliki obyek penyelidikan yang jelas, sesuai aturan perundang-undangan. "Kami dikaitkan dengan Perkara e-KTP. Padahal, kami bekerja dalam konteks penyelidikan, melaksanakan undang-undang," tegas dia.

KPK Gunakan Pola Arogansi CIA

Selain pimpinan dan anggota Pansus, acara tersebut dihadiri Pengamat Hukum Johnson Panjaitan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Syaiful Bakhri. Adhie menilai, KPK kerap menggunakan cara-cara arogan dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu, kata dia, dapat menjadi salah satu bahan evaluasi yang bisa dibahas oleh Pansus. "Arogansi KPK ini hampir sama dengan pola yang digunakan CIA (Central Intelligence Agency) dalam mengusut kasus," ujar juru bicara era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. ■ TIM/ONI